

ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA: MENGGUNAKAN PENDEKATAN PANEL SIMULTAN

Sri Ningsih¹, Nuriah Alfisyahri², Deki Irawan³, Rian Putra⁴

Universitas Jambi

sriningsih@unja.ac.id¹, nuriahalfisyahri@unja.ac.id² dekiirawan@unja.ac.id³,
rianputra@unja.ac.id⁴

Abstract

This study aims to analyze the relationship between Financial Inclusion and Inclusive Growth in Indonesia. Financial inclusion is calculated using the Financial Inclusion Index, Inclusive Growth is measured using the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGGR) method. This study used the Simultaneous Panels data with the ILS (Indirect Least Square) method to analyze the effect of exogenous variables on endogenous variables. Utilizing secondary data, the data in this study is time series and cross-sections from 2019 – 2023. The results of this study conclude that financial inclusion in Indonesia is still "Low Inclusion" while inclusive growth in employment opportunities shows that Indonesia is in the "Not Pro Jobs" inclusive category and inclusive growth in income inequality is in the "Not Pro Poor Yet" category. The relationship between financial inclusion and inclusive growth leads to a positive and significant relationship to inclusive growth in Indonesia. These findings indicate that financial inclusion can be an important factor in achieving inclusive economic growth in Indonesia.

Keywords: Inclusive Growth in unemployment, Inclusive Growth in Income Inequality, Financial Inclusion, Simultaneous Panel Data Model

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di Indonesia serta melihat faktor yang mempengaruhinya. Inklusi keuangan dihitung menggunakan index financial inclusion, sedangkan pertumbuhan inklusif diukur menggunakan metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGGR). Model analisis yang digunakan adalah Model persamaan panel simultan dengan metode ILS (Indirect Least Square) untuk menganalisis pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data dalam penelitian ini merupakan data panel dari 2019 – 2023.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan di Indonesia masih “Low Inclusion” sementara itu Pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja menunjukkan bahwa Indonesia berada pada kategori inklusifitas “ Not Pro Jobs Yet” dan pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan berada pada kategori “Not Pro Poor Yet”. Hubungan inklusi keuangan terhadap pertumbuhan inklusif menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Dari temuan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat menjadi faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Kata kunci: Pertumbuhan Inklusif terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Inklusif terhadap Ketimpangan Pendapatan, Inklusi keuangan, Panel Simultan

1. Pendahuluan

Pertumbuhan inklusif merupakan sebuah goals yang kini telah menjadi sasaran utama banyak negara, terutama negara-negara emerging countries yang masih terjebak dalam kondisi middle income trap, dimana negara-negara tersebut menghadapi pertumbuhan ekonomi tinggi namun diikuti oleh ketimpangan yang besar, serta angka kemiskinan yang masih tinggi dan tingkat pengangguran yang tidak kunjung membaik. sehingga diperlukan penguatan pada sektor moneter untuk mendorong terciptanya suatu pertumbuhan yang berkualitas. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sudah naik level dari Lower Middle Income menjadi Upper Middle Income (World Bank, 2020). Artinya jika dilihat dari Gross National Income/GNI perkapitanya maka Indonesia sudah berada pada pendapatan perkapita sebesar 4.046 dollar AS - 12.535 dollar AS pertahun. Namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih diikuti oleh ketimpangan tinggi, kemiskinan yang meskipun menunjukkan trend menurun, namun angkanya masih tergolong tinggi, demikian juga dengan tingkat penganggurannya (BPS, Statistik Indonesia, 2024).

Pertumbuhan Inklusif merupakan pertumbuhan dimana terjadinya peningkatan pertumbuhan dalam perekonomian dan kemudian pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Pertumbuhan inklusif mengarah pada akselerasi pada pola pertumbuhan ekonomi, yang berarti pertumbuhan yang luas yang berpihak kepada penduduk miskin (Dixit & Ghosh, 2013). Sementara itu Anand ,dkk (2013) menyatakan bahwa agar pertumbuhan menjadi pertumbuhan berkelanjutan yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, menurunkan ketimpangan serta meningkatkan kesempatan kerja, maka pertumbuhan tersebut haruslah inklusif.

Dalam upaya mencapai suatu pertumbuhan yang inklusif maka diperlukan peran dan support dari sektor ekonomi moneter. Inklusi keuangan merupakan salah satu tools yang kemudian mempunyai peran dalam memperluas jangkauan serta

akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan. Menurut Wachira & Kihiu (2012); Park & Mecardo (2018) Inklusi keuangan merupakan hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan sehingga dianggap sebagai alat efektif yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan suatu negara. Mbutor & Uba (2013) menegaskan bahwa negara dengan kategori inklusi keuangan yang lebih tinggi akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang juga lebih tinggi, dan penduduk yang termasuk “*finansially*” biasanya akan menjadi lebih produktif, mengkonsumsi lebih banyak dibanding masyarakat “*non finansially*” dan tentunya mereka juga akan berinvestasi lebih banyak. Kemudian hal ini tentu akan berimbas pada terdorongnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Pertumbuhan inklusif dan Inklusi keuangan merupakan suatu pengembangan konsep dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektor keuangan. Dimana dua topik ini sudah pernah diteliti yang mana hasil penelitian terdahulu memberikan bukti empiris bahwa sektor keuangan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga artinya jika konsep pertumbuhan ekonomi kini berkembang menjadi pertumbuhan yang inklusif dan pengembangan sektor keuangan berkembang menjadi konsep keuangan yang inklusif. Maka hal itu berarti inklusi keuangan ini memiliki pengaruh positif dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif. Pembangunan sektor keuangan dapat membantu masyarakat miskin. Semakin tinggi pembangunan sektor keuangan, akan mendorong pendapatan masyarakat miskin tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita (PDRB/kapita) sehingga ketimpangan pendapatan semakin rendah. 60% dari pertumbuhan sektor keuangan berdampak pada pertumbuhan secara agregat dan 40% lainnya berdampak terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan (Beck, Demirguc-Kunt, & Levine, 2007; Alekhina & Ganelli, 2020). Menurut OJK (2020) peningkatan 20 persen dalam tingkat inklusi keuangan suatu negara, akan dapat menciptakan tambahan 1,7 juta pekerjaan baru. Hal ini menegaskan bagaimana peningkatan inklusi keuangan terbukti akan dapat mendorong upaya penurunan tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mempersempit ketimpangan.

Selain dipengaruhi oleh inklusi keuangan, pertumbuhan inklusif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kualitas pendidikan, Investasi, pengeluaran pemerintah dan populasi (Pandiella, 2016; Anand & dkk, 2013; Alekhina & Ganelli, 2020)

Sementara itu dalam penelitian ini juga dilihat faktor apa saja yang menjadi penentu inklusi keuangan, hal ini dilakukan agar capaian inklusi keuangan yang tinggi di Indonesia dapat diperoleh sehingga pada akhirnya dapat mendorong tercapai pertumbuhan yang inklusif di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan, yaitu Pendapatan perkapita, Inflasi, Non Performing

Loan dan teknologi (Sarma & Pais, 2011; Evans & Osi, 2017; Gebrehiwot & Makina, 2019)

Menggunakan pendekatan model panel simultan pada 33 provinsi di Indonesia, penelitian ini menjadi penelitian yang pertama yang melihat hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif secara lebih mendalam. Dengan lebih komprehensif penelitian ini mengkaji hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan inklusif di indonesia serta mendalami faktor faktor yang mempengaruhi kedua topik utama penelitian ini.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan inklusif didefinisikan oleh Ali & Zhuang (2007) sebagai pertumbuhan yang mendorong *equal opportunities* serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan dalam ekonomi. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memungkinkan semua anggota masyarakat berpartisipasi dan berkontribusi secara setara terhadap pertumbuhan ekonomi, terlepas dari keadaan individu. Sementara itu Rauniyar & Kanbur (2010) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang diiringi dengan menurunnya ketimpangan pendapatan. Dalam penelitiannya mereka mendukung pertumbuhan untuk penduduk miskin (*pro-poor growth*). Hasil penelitiannya yaitu ketika pertumbuhan ekonomi untuk orang miskin lebih rendah daripada untuk orang kaya maka ketimpangan akan semakin meningkat, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi untuk orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, maka ketimpangan akan berkurang. Alekhina & Ganelli (2020) menggunakan pendekatan “*relative pro-poor growth*”, di mana pertumbuhan diartikan sebagai inklusif ketika pendapatan masyarakat miskin tumbuh relatif lebih cepat daripada pendapatan rata-rata penduduk.

2.2. Inklusi Keuangan

Menurut buku *The Purchasing Power of Money* yang ditulis oleh Fisher (1911), untuk meningkatkan output ekonomi suatu bangsa yang terpenting bukan saja jumlah uang (*Money Supply*) namun juga kecepatan beredarnya (*Velocity of Circulation*). Dari argumen tersebut bisa didapatkan bahwa untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini yang berkualitas, tidak hanya berdasar pada kecepatan bank sentral dalam mencetak uang (yang tentu saja terbatas), namun juga



bisa diperoleh dari kemampuan sistem keuangan di dalam negara tersebut untuk berputar lebih cepat dalam jumlah yang lebih masif (menyeluruh ke seluruh penduduk).

Jika dihubungkan dengan inklusi keuangan maka Sarma & Pais (2011) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan suatu proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi tanpa terkecuali. Inklusi keuangan ini merupakan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Sementara itu menurut Dixit & Ghosh (2013); Tuesta, dkk (2015) iinklusii keuangan merupakan pemberian layanan keuangan, termasuk didalamnya layanan perbankan dan layanan kredit, dengan biaya yang terjangkau bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung serta yang berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan.

2.3. Hubungan Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif

Sektor moneter melalui inklusi keuangan merupakan suatu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, terutama dalam menciptakan pertumbuhan yang mengentaskan kemiskinan serta memeratakan distribusi pendapatan. Menurut (Oji, 2015), Agar pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan terjadi, maka diperlukan masyarakat yang terlibat dalam lebih banyak kegiatan ekonomi dimana transaksi keuangan terjadi. Malalui inklusi keuangan maka proses ini akan lebih mudah terjadi, dimana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses sektor keuangan, baik itu dengan biaya yang murah serta fasilitas sektor keuangan yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Sementara itu Dixit & Ghosh (2013), menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pertumbuhan inklusif maka dibutuhkan sumber daya, dan untuk menghasilkan sumber daya itu maka mobilisasi inklusi keuangan sangat diperlukan, Inklusi keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tujuan utama ekonomi pembangunan adalah mencari cara untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja serta jauh dari adanya ketimpangan pada distribusi pendapatan. Memiliki akses keuangan disebut sebagai faktor penting yang memungkinkan orang mengubah kegiatan produksi dan ketenagakerjaan mereka serta untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Akses keuangan oleh penduduk miskin adalah sebuah syarat untuk mengentaskan ketimpangan dan mengurangi pengangguran yang pada akhirnya akan keluar dari kemiskinan guna untuk mencapai sebuah pertumbuhan yang inklusif serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Swamy, 2008; Manoj, 2015; Ozili, 2020).

2.4. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Inklusif

Selain didorong oleh inklusi keuangan, pertumbuhan inklusif juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dibawah ini:

2.4.1. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya waktu yang mereka gunakan untuk mengakses pendidikan serta fokus masyarakat terhadap pendidikan , maka hal tersebut menunjukkan semakin meningkat kualitas *human capital*nya (Klasen, 2010; Pandiella, 2016). Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang masyarakat, maka akan semakin berkualitas sumber daya manusianya, SDM yang berkualitas akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap SDM tersebut untuk mendapatkan akses terhadap kemajuan ekonomi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas pendidikan adalah Angka partisipasi Sekolah Kasar (APK)

2.4.2. Kualitas Kesehatan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan untuk seluruh masyarakat di segala jenis usia adalah salah satu target dari pembangunan yang berkelanjutan (SDGS). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan modal kuat dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia tersebut sangat erat hubungannya dengan usia harapan hidup penduduk, semakin lama angka harapan hidupnya yang dilihat dari kondisi kesehatan penduduk dimasa sekarang menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik (BPS, Statistik Indonesia, 2020). Hubungan kesehatan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif sejalan dengan penelitian (James & Sassi, 2017; Turaga, 2018)

2.4.3. Investasi

Dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, maka investasi memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan Pengangguran. Investasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya bisa mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dan tercapainya suatu pertumbuhan yang inklusif (Sethy, 2018; Alekhina & Ganelli, 2020). Menurut Samuelson (2011), investasi merupakan penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Hal ini mengartikan bahwa investasi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Sehingga kegiatan investasi yang dilakukan saat ini sangat erat hubungannya dengan prospek mendapatkan untung dimasa datang. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah investasi modal

fisik (PMTB/ Pembentukan Modal Tetap Bruto) yang merupakan salah satu bentuk investasi swasta yang digunakan untuk pembangunan gedung, bandara, infrastruktur jalan dan lain sebagainya) (BPS, Statistik Indonesia, 2024)

2.4.4. Penduduk

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan teori tentang penduduk. (Conway, 2015) Dalam *“Essay on Population”*, Malthus berasumsi bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup suatu populasi, nafsu manusia sama sekali tidak dapat ditahan dan sementara itu pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan bahan makanan. Teori Malthus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk sejatinya mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan bahan pangan mengikuti deret hitung. Anyanwu (2013), menyatakan hubungan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan yang inklusif dimana dikatakan bahwa tingkat populasi yang lebih tinggi cenderung akan meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk 33 provinsi di Indonesia (jiwa).

2.5. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan

2.5.1. Pendapatan Perkapita

Negara dengan pendapatan perkapita rendah cenderung menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang sama rendahnya, dan sebaliknya jika pendapatan perkapitanya tinggi maka hal tersebut akan menggambarkan tingkat inklusi keuangan yang tinggi di negara tersebut (Gebrehiwot & Makina, 2019; Evans & Osi, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan indikator PDRB Perkapita 33 provinsi di Indonesia (rupiah).

2.5.2. Inflasi

Mbutor & Uba (2013); Huong (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor dari segi kebijakan moneter adalah inflasi, inflasi rendah dan terkendali dapat memberikan peran dalam membantu tercapainya sektor keuangan yang inklusif. Dengan tingkat inflasi yang rendah, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk mengakses lembaga keuangan dibanding ketika keadaan inflasi tinggi (Filardo, 2016). Dalam penelitian ini menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) 33 provinsi di Indonesia.

2.5.3. Non Performing Loan

Angka kredit macet yang tinggi mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persentase kredit macet terhadap total kredit yang masih dianggap

aman, tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbankan adalah maksimal 5%. Peningkatan NPL terhadap kredit akan berpengaruh terhadap semakin rendahnya inklusi keuangan disuatu daerah (Hanning & Jansen, 2010; Annisa & Arifin, 2019). Dalam penelitian ini indikator NPL menggunakan data Persentase NPL terhadap total kredit bank umum konvensional 33 provinsi di Indonesia (persen).

2.5.4. Teknologi

Di era yang semakin maju ini, teknologi merupakan suatu hal yang sangat penting. Masyarakat dituntut untuk melek teknologi, karena teknologi dapat memudahkan kita melakukan segala hal, termasuk mengakses sektor keuangan. Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan pesatnya penggunaan internet memunculkan beberapa *fintech* yang akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan secara digital. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa peningkatan inklusi keuangan nasional dapat dipicu oleh salah satu faktor yaitu peningkatan akses dalam penggunaan *fintec*. Semakin banyaknya masyarakat yang mengakses teknologi dengan asumsi digunakan untuk mengakses sektor keuangan, maka hal tersebut akan berperan dalam peningkatan inklusi keuangan (Evans & Osi, 2017; Gebrehiwot & Makina, 2019). Dalam penelitian ini teknologi menggunakan indikator persentase penduduk pengguna teknologi internet 33 provinsi di Indonesia (persen).

2.6. Menghitung Pertumbuhan Inklusif Terhadap Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian ini pertumbuhan yang inklusif dilihat dari dua konsep, yaitu pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Menggunakan metode perhitungan *Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)* yang pertama kali dikemukakan oleh Kakwani & Son (2006) dan dikembangkan oleh Klasen (2010) dan diadopsi oleh Cahyadi, dkk (2018), Maka penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk menghitung pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan dan Kesempatan Kerja di Indonesia.

2.6.1. Indeks Pertumbuhan Inklusif Terhadap Kesempatan Kerja

Indeks pertumbuhan inklusif terhadap pengurangan angka pengangguran dibentuk menggunakan jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja.

Dimana :

IGem : koefisien pertumbuhan inklusif terhadap pengangguran;

Eem : elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah angkatan kerja;

Eemg : elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi:

G_g : pertumbuhan ekonomi :



$IGem$ menyatakan inklusivitas pertumbuhan terhadap pengangguran, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IGem > Gg$.

2.6.2. Indeks Pertumbuhan Inklusif Terhadap Ketimpangan

Indeks Pertumbuhan inklusif terhadap Ketimpangan pendapatan dibentuk menggunakan pendapatan perkapita dan indeks gini.

Dimana :

IGin : koefisien pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan;

Ein : elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan perkapita;

Eing : elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi;

Gg : pertumbuhan ekonomi;

I_{Gin} menyatakan inklusivitas pertumbuhan terhadap ketimpangan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $I_{Gin} > G_g$.

Nilai PEGR dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Jika $IG=Gg$ maka artinya pertumbuhan bersifat *netral*, setiap orang menerima manfaat yang sama secara proporsional dari pertumbuhan.
 2. Jika $IG > Gg$ berarti pertumbuhan bersifat *pro poor growth*, penduduk miskin lebih banyak menerima manfaat dari pertumbuhan.
 3. Jika $0 < IG < Gg$ berarti pertumbuhan bersifat *not pro poor growth*, manfaat pertumbuhan lebih banyak diterima penduduk tidak miskin (ketidakmerataan meningkat) tetapi masih terjadi pengurangan kemiskinan.
 4. Jika $IG < 0$ berarti pertumbuhan bersifat *anti poor* atau manfaat pertumbuhan yang dinikmati penduduk tidak miskin, kemiskinan meningkat.

2.7. Mengukur Indeks Inklusi Keuangan

Indeks inklusi keuangan merupakan ukuran dari tingkat inklusi keuangan. Perhitungan indeks inklusi keuangan atau *Index Financial Inclusion* (IFI) dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Sarma & Pais (2011) Indeks inklusi keuangan ini mencakup tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. Indeks inklusi keuangan dapat dihitung jika masing-masing dimensi telah dihitung nilai indeks dimensinya. Indeks dari setiap dimensi (d_i) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:



Dimensi yang pertama adalah penetrasi perbankan yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan. Indikator yang menggambarkan dimensi ini adalah jumlah rekening deposit. Namun karena data jumlah rekening deposit per provinsi tidak tersedia maka perhitungan dalam pengukuran dimensi ini diwakili oleh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1000 penduduk yang dapat dihitung dengan rumus berikut :

Dimensi kedua dari inklusi keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan yang menggambarkan jangkauan perbankan kepada masyarakat. Indikator yang menggambarkan dimensi ini dapat berupa outlet dari perbankan misalkan jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di suatu wilayah. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk dimensi ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah kantor cabang bank umum konvensional di setiap provinsi per 100.000 orang dewasa.

Yang dihitung dengan rumus :

$$D_2 = \frac{\Sigma \text{Kantor Layanan Bank Tahun}_t}{\text{Jumlah Penduduk Tahun}_t} \times 100.000 \dots \quad (5)$$

Dimensi ketiga dari inklusi keuangan adalah kegunaan jasa perbankan yang menggambarkan manfaat jasa perbankan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan dimensi ini dapat berupa jumlah tabungan, kredit, remitansi, asuransi, dan jasa lainnya yang ditawarkan oleh perbankan. Namun, untuk mempermudah dalam perhitungan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Pembiayaan atau total kredit perbankan % terhadap PDRB per Provinsi di Indonesia. Yang dihitung dengan rumus :

Oleh karena itu, nilai indeks inklusi keuangan akan berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, sistem keuangan semakin inklusif. Jika jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X_1 , yaitu:

IFI dibawah ini merupakan rata-rata sederhana dari X1 dan X2

3. Metode Penelitian (bold 12 pt)

Penelitian dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia pada rentang waktu pengambilan tahun 2014 sampai 2019 dengan menggunakan data tahunan. Data dalam penelitian adalah data Panel Simultan dengan *crossection* 33 provinsi dan *time series* 6 tahun. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait yaitu, Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia dan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan, dimana terdapat dua persamaan yaitu persamaan inklusi keuangan dan persamaan pertumbuhan inklusif.

$$Y_{2it} = \alpha_1 + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \beta_8 X_{8it} + \beta_9 Y_{1it} + e_{2it} \quad (11)$$

Dimana :

Variabel	Deskripsi Variabel
Y1	Inklusi Keuangan
Y2	Pertumbuhan Inklusi Terhadap Kesempatan Kerja
Y3	Pertumbuhan Inklusif Terhadap Ketimpangan Pendapatan
α	Kontansta
β_1	Koefisien Regresi dari X1
β_2	Koefisien Regresi dari X2
β_3	Koefisien Regresi dari X3
β_4	Koefisien Regresi dari X4
β_5	Koefisien Regresi dari X5
β_6	Koefisien Regresi dari X6
β_7	Koefisien Regresi dari X7
β_8	Koefisien Regresi dari X8
β_9	Koefisien Regresi dari Y1
X1	PDRB Per Kapita
X2	Inflasi
X3	Kredit Macet
X4	Internet User
X5	Pendidikan
X6	Kesehatan
X7	IlInvestasi
X8	Populasi
ε_{it}	Term of error

Dalam mengestimasi persamaan simultan diperlukan syarat cukup dan perlu, yaitu melalui uji identifikasi model menggunakan uji order kondisi dan rank kondisi. Berdasarkan hasil identifikasi model persamaan simultan, maka model ini akan diestimasi menggunakan metode *Indirect Least Square* (Gujarati, 2012)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pertumbuhan Inklusif terhadap Kesempatan Kerja

Berkurangnya angka pengangguran menjadi salah satu ukuran untuk melihat inklusifitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan disebut inklusif terhadap kesempatan kerja apabila nilai koefisiem IGem (Indeks Pertumbuhan inklusif terhadap kesempata kerja) lebih besar dari nilai perubahan pada pertumbuhan ekonominya (Gg)



Provinsi	2019		2020		2021		2022		2023		Rata Rata	
	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg
ACEH	0,00	0,04	0,05	(0,00)	(0,00)	0,03	0,01	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03
SUMATERA UTARA	(0,01)	0,05	(0,01)	(0,01)	0,02	0,03	0,02	0,05	0,04	0,05	0,01	0,03
SUMATERA BARAT	0,02	0,05	0,03	(0,02)	(0,00)	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03
RIAU	(0,01)	0,03	0,01	(0,01)	0,02	0,03	0,01	0,04	(0,06)	0,04	(0,00)	0,03
JAMBI	(0,01)	0,04	0,04	(0,01)	0,00	0,04	0,02	0,05	0,00	0,05	0,01	0,03
SUMATERA SELATAN	0,00	0,06	0,04	(0,00)	0,02	0,04	0,02	0,05	0,02	0,05	0,02	0,04
BENGKULU	0,01	0,05	0,03	(0,00)	(0,01)	0,03	0,01	0,04	0,03	0,04	0,01	0,03
LAMPUNG	0,01	0,05	0,03	(0,02)	0,00	0,03	0,02	0,04	0,07	0,04	0,02	0,03
KEP. BANGKA BELITUNG	(0,01)	0,03	0,00	(0,02)	(0,00)	0,05	0,04	0,04	0,02	0,04	0,01	0,03
KEP. RIAU	0,04	0,05	0,12	(0,04)	0,06	0,03	0,04	0,05	(0,14)	0,05	0,02	0,03
DKI JAKARTA	(0,02)	0,06	0,03	(0,03)	(0,01)	0,03	0,01	0,05	0,03	0,05	0,010	0,03
JAWA BARAT	0,05	0,05	0,02	(0,02)	0,02	0,04	0,03	0,05	(0,01)	0,05	0,02	0,03
JAWA TENGAH	0,01	0,05	0,03	(0,03)	0,01	0,03	0,03	0,05	0,08	0,05	0,03	0,03
DI YOGYAKARTA	0,01	0,06	(0,01)	(0,03)	0,05	0,05	0,00	0,05	(0,05)	0,05	(0,00)	0,04
JAWA TIMUR	0,03	0,05	0,02	(0,02)	0,00	0,04	0,02	0,05	0,04	0,05	0,02	0,03
BANTEN	0,04	0,05	0,03	(0,04)	0,01	0,04	0,03	0,05	(0,08)	0,05	0,00	0,03
BALI	(0,02)	0,05	0,02	(0,10)	0,00	(0,03)	0,06	0,05	(0,02)	0,06	0,010	0,007
NU SA TENGGARA BARAT	0,10	0,04	0,03	(0,01)	0,02	0,02	0,02	0,07	0,06	0,02	0,05	0,03
NU SA TENGGARA TIMUR	(0,00)	0,05	0,05	(0,01)	0,02	0,02	0,03	0,03	(0,01)	0,03	0,02	0,03
KALIMANTAN BARAT	0,01	0,05	0,02	(0,02)	0,01	0,05	0,02	0,05	0,08	0,04	0,03	0,03
KALIMANTAN TENGAH	0,01	0,06	0,01	(0,01)	0,02	0,03	(0,00)	0,06	0,00	0,04	0,01	0,04
KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,04	0,02	(0,02)	0,01	0,03	(0,01)	0,05	(0,01)	0,05	0,00	0,03
KALIMANTAN TIMUR	0,04	0,05	0,01	(0,03)	0,02	0,02	0,00	0,04	0,05	0,06	0,02	0,03
SULAWESI UTARA	0,02	0,06	0,00	(0,01)	(0,01)	0,04	0,02	0,05	0,07	0,05	0,02	0,04
SULAWESI TENGAH	(0,01)	0,07	0,04	0,19	0,01	0,11	0,03	0,14	(0,03)	0,11	0,01	0,12
SULAWESI SELATAN	0,01	0,07	0,00	(0,01)	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04	0,02	0,04
SULAWESI TENGGARA	0,01	0,06	0,03	(0,01)	0,02	0,04	0,00	0,05	0,01	0,05	0,01	0,04
GORONTALO	0,01	0,06	(0,00)	(0,00)	0,01	0,02	0,05	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03
SULAWESI BARAT	0,03	0,06	0,02	(0,02)	0,02	0,03	0,06	0,02	0,01	0,05	0,03	0,03
MALUKU	0,02	0,05	0,03	(0,01)	0,02	0,04	0,01	0,05	0,05	0,05	0,03	0,04
MALUKU UTARA	0,01	0,06	0,00	0,05	0,02	0,16	0,02	0,21	0,09	0,19	0,03	0,13
PAPUA BARAT	0,04	0,03	0,05	(0,01)	0,04	(0,00)	0,00	0,02	0,14	0,04	0,06	0,01
PAPUA	0,00	(0,17)	(0,05)	0,02	0,10	0,14	0,02	0,09	0,23	0,05	0,06	0,03
INDONESIA	0,01	0,04	0,02	(0,01)	0,02	0,04	0,02	0,06	0,03	0,05	0,02	0,04

Tabel 1. Koefisien Pertumbuhan Inklusif Terhadap Kesempatan Kerja di 33 Provinsi di Indonesia 2019 – 2123

Sumber: BPS (2023) data Diolah menggunakan model PEGR (*Poverty Equivalent Growth Rate*)

Keterangan: IGem = Gg Neutral , IGem > Gg = *Pro Jobs*, 0< IGem < Gg = *Not Pro Jobs Yet*, IGem < 0 = *Anti Jobs*

Berdasarkan informasi pada Tabel 1 diatas, dapat diketahui kondisi pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia secara rata-rata selama tahun pengamatan masih berada pada kondisi *Not Pro Jobs Yet*. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sudah mengarah pada pertumbuhan yang inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia secara agregat. Pada tahun 2020 kondisi perekonomian Indonesia mengalami Kontraksi sebesar -2,07 %. Hal itu yang disebabkan oleh dampak pandemi covid 19 yang menyebabkan kelumpuhan perekonomian di berbagai sektor. Sehingga kondisi tersebut secara matematis membuat perhitungan inklusifitas terhadap kesempatan kerja berkinerja baik, karena nilai indeks inklusifitas perekonomian lebih besar dari nilai pertumbuhan ekonominya. Namun hal itu tentu tidak bisa kita jadikan patokan keberhasilan pertumbuhan inklusif karena faktanya pada tahun 2020 tersebut jumlah pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 9,77 juta jiwa dari 7,02 juta orang pada tahun sebelumnya (BPS, Statistik Indonesia, 2020). Selama tahun pengamatan, tahun 2019 menjadi tahun terburuk untuk inklusifitas pertumbuhan terhadap kesempatan kerja di Indonesia, dimana ditahun tersebut terdapat 8 provinsi dengan kategori *Anti Jobs* yang artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat menyerap tenaga kerja. Para *jobs seeker* kesulitan masuk kedalam dunia kerja meskipun ekonomi masih stabil dibanding tahun 2018. (BPS, Statistik Indonesia, 2024)

4.2. Pertumbuhan Inklusif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Menurunnya angka ketimpangan merupakan konsep pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan dianggap inklusif terhadap ketimpangan jika nilai koefisien IG_{in} (Indeks pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan) bernilai positif dan nilainya lebih besar dibanding perubahan pada pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan data hasil perhitungan Pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan, maka dapat diketahui jika dirata ratakan berdasarkan nilai koefisiennya pada gambar 3, maka terdapat 4 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan yang yang sama sekali tidak dapat mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, yaitu Papua Barat, Papua, Bali dan Kepulauan Riau. Keempat provinsi tersebut berada pada kategori ketimpangan sedang yaitu berkisar 0,31 – 0,50 pertahunnya, sedangkan pertumbuhan ekonominya relatif stabil diangka paling sedikit 5% pertahun. Sementara 29 Provinsi lainnya di Indonesia adalah provinsi povinsi dengan pertumbuhan yang masih berada pada kategori *Not Pro Poor Yet*, dimana koefisien inklusitafnya sudah positif namun pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat *non miskin*.

Untuk lebih menjelaskan bagaimana kondisi inklusifitas pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan 33 provinsi di Indonesia pertahunnya dapat dilihat

pada tabel nilai koefisien pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan dibawah ini:



Provinsi	2019		2020		2021		2022		2023		Rata Rata		
	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	
ACEH	0,00	0,04	0,05	(0,00)	(0,00)	0,03	0,01	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03	
SUMATERA UTARA	(0,01)	0,05	(0,01)	(0,01)	0,02	0,03	0,02	0,05	0,04	0,05	0,02	0,03	
SUMATERA BARAT	0,02	0,05	0,03	(0,02)	(0,00)	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,02	0,03	
RIAU	(0,01)	0,03	0,01	(0,01)	0,02	0,03	0,01	0,04	(0,06)	0,04	0,02	0,03	
JAMBI	(0,01)	0,04	0,04	(0,01)	0,00	0,04	0,02	0,05	0,00	0,05	0,02	0,03	
SUMATERA SELATAN	0,00	0,06	0,04	(0,00)	0,02	0,04	0,02	0,05	0,02	0,05	0,03	0,04	
BENGKULU	0,01	0,05	0,03	(0,00)	(0,01)	0,03	0,01	0,04	0,03	0,04	0,02	0,03	
LAMPUNG	0,01	0,05	0,03	(0,02)	0,00	0,03	0,02	0,04	0,07	0,04	0,01	0,03	
KEP. BANGKA BELITUNG	(0,01)	0,03	0,00	(0,02)	(0,00)	0,05	0,04	0,04	0,02	0,04	0,02	0,03	
KEP. RIAU	0,04	0,05	0,12	(0,04)	0,06	0,03	0,04	0,05	(0,14)	0,05	(0,00)	0,03	
DKI JAKARTA	(0,02)	0,06	0,03	(0,03)	(0,01)	0,03	0,01	0,05	0,03	0,05	0,03	0,03	
JAWA BARAT	0,05	0,05	0,02	(0,02)	0,02	0,04	0,03	0,05	(0,01)	0,05	0,03	0,03	
JAWA TENGAH	0,01	0,05	0,03	(0,03)	0,01	0,03	0,03	0,05	0,08	0,05	0,02	0,03	
DI YOGYAKARTA	0,01	0,06	(0,01)	(0,03)	0,05	0,05	0,00	0,05	(0,05)	0,05	0,03	0,04	
JAWA TIMUR	0,03	0,05	0,02	(0,02)	0,00	0,04	0,02	0,05	0,04	0,05	0,02	0,03	
BANTEN	0,04	0,05	0,03	(0,04)	0,01	0,04	0,03	0,05	(0,08)	0,05	0,02	0,03	
BALI	(0,02)	0,05	0,02	(0,10)	0,00	(0,03)	0,06	0,05	(0,02)	0,06	(0,00)	0,01	
NUSA TENGGARA BARAT	0,10	0,04	0,03	(0,01)	0,02	0,02	0,02	0,07	0,06	0,02	0,01	0,03	
NUSA TENGGARA TIMUR	(0,00)	0,05	0,05	(0,01)	0,02	0,02	0,03	0,03	(0,01)	0,03	0,02	0,03	
KALIMANTAN BARAT	0,01	0,05	0,02	(0,02)	0,01	0,05	0,02	0,05	0,08	0,04	0,01	0,03	
KALIMANTAN TENGAH	0,01	0,06	0,01	(0,01)	0,02	0,03	(0,00)	0,06	0,00	0,04	0,03	0,04	
KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,04	0,02	(0,02)	0,01	0,03	(0,01)	0,05	(0,01)	0,05	0,03	0,03	
KALIMANTAN TIMUR	0,04	0,05	0,01	(0,03)	0,02	0,02	0,00	0,04	0,05	0,06	0,01	0,03	
SULAWESI UTARA	0,02	0,06	0,00	(0,01)	(0,01)	0,04	0,02	0,05	0,07	0,05	0,02	0,04	
SULAWESI TENGAH	(0,01)	0,07	0,04	0,19	0,01	0,11	0,03	0,14	(0,03)	0,11	0,12	0,12	
SULAWESI SELATAN	0,01	0,07	0,00	(0,01)	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04	
SULAWESI TENGGARA	0,01	0,06	0,03	(0,01)	0,02	0,04	0,00	0,05	0,01	0,05	0,03	0,04	
GORONTALO	0,01	0,06	(0,00)	(0,00)	0,01	0,02	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	
SULAWESI BARAT	0,03	0,06	0,02	(0,02)	0,02	0,03	0,06	0,02	0,01	0,05	0,01	0,03	
MALUKU	0,02	0,05	0,03	(0,01)	0,02	0,04	0,01	0,05	0,05	0,05	0,02	0,04	
MALUKU UTARA	0,01	0,06	0,00	0,05	0,02	0,16	0,02	0,21	0,09	0,19	0,12	0,13	
PAPUA BARAT	0,04	0,03	0,05	(0,01)	0,04	(0,00)	0,00	0,02	0,14	0,04	(0,03)	0,01	
PAPUA	0,00	(0,17)	(0,05)	0,02	0,10	0,14	0,02	0,09	0,23	0,05	(0,03)	0,03	
INDONESIA	0,01	0,04	0,02	(0,01)	0,02	0,04	0,04	0,02	0,06	0,03	0,05	0,02	0,04

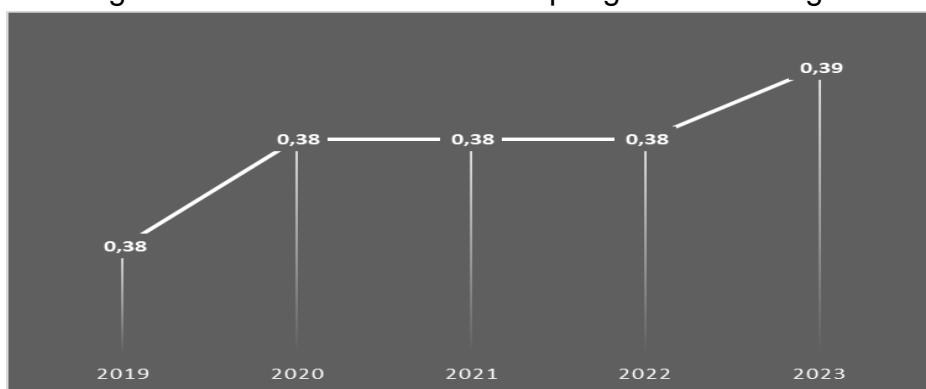
Tabel 2. Koefisien Pertumbuhan Inklusif Terhadap Ketimpangan Pendapatan di 33 Provinsi di Indonesia 2019 -2023

Sumber: BPS (2023) data Diolah menggunakan model PEGR (*Poverty Equivalent Growth Rate*)

Keterangan: $IG_p = G_g$ Neutral , $IG_p > G_g$ = *Pro Poor*, $0 < IG_p < G_g$ = *Not Pro Poor Yet*, $IG_p < 0$ = *Anti Poor*

Berdasarkan informasi pada Tabel 2 diatas, dapat diketahui kondisi pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan di Indonesia secara rata-rata selama tahun pengamatan masih berada pada kondisi *Not Pro Poor Yet*. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah baik nasional maupun daerah sudah terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, meskipun nilai koefisien pertumbuhan inklusifnya masih lebih kecil dibanding nilai perubahan pada pertumbuhan ekonominya. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa nilai koefisien yang ditunjukkan bernilai positif. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sedikit yang dinikmati oleh masyarakat miskin. Selama tahun pengamatan, pada tahun 2020 jika dihitung secara matematis Indonesia secara rata rata 33 provinsi berada pada kondisi pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan pada tahun tersebut sehingga perhitungan menunjukkan nilai koefisian Inklusifitas menjadi lebih besar dibandingkan dengan peubah pada pertumbuhan ekonominya.

Pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan di Indonesia yang menunjukkan koefisien yang positif namun belum dikategorikan *pro poor* dapat didukung oleh data indeks gini di Indonesia selama tahun pengamatan sebagai berikut :



Gambar 1. Gini Rasio Indonesia 2019 -2023

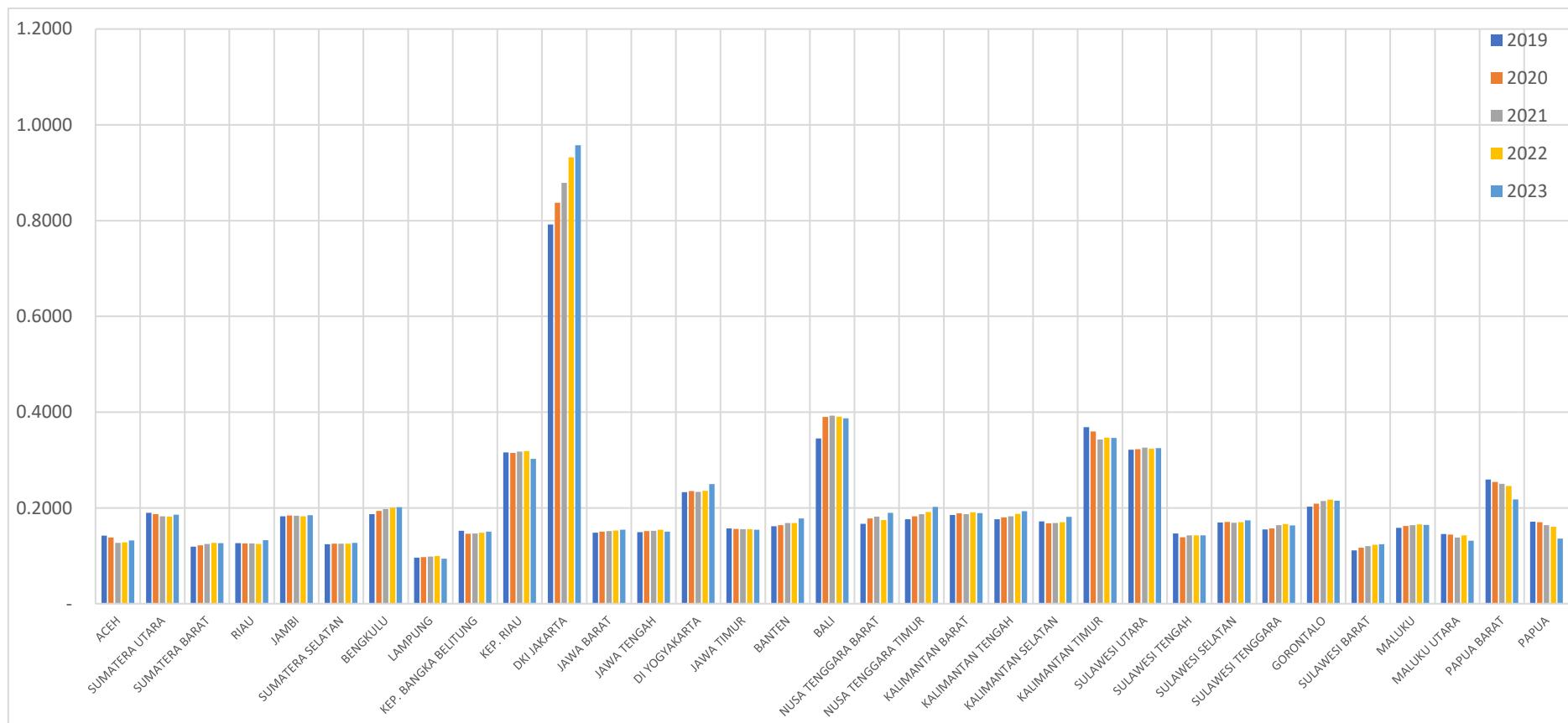
Sumber: (BPS, Statistik Indonesia, 2023)

Pada Gambar 1. diatas dapat dilihat bahwa angka ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki trend yang relatif stabil namun mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 -2023 di Indonesia diangka ketimpangan sedang. Meskipun tidak terbaik kenaikan drastis, namun angka ini menunjukkan kondisi ketimpangan Pendapatan di Indonesia yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia tidak memandang apakah pertumbuhan itu akan mengurangi ketimpangan pendapatan atau tidak yang berarti pertumbuhan yang terjadi masih lebih banyak dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas dibanding masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah.

4.3. Indeks Inklusi Keuangan di Indonesia

Salah satu pengembangan konsep sektor moneter adalah melalui inklusi keuangan, indeks inklusi keuangan berkisar antara 0 – 1. Berikut adalah hasil perhitungan indeks inklusi keuangan pada 33 provinsi di Indonesia:





Gambar 2. Indeks Inklusi Keuangan pada 33 Provinsi di Indonesia 2019 -2023

Sumber : SPI OJK (2023) Data IFI Hasil Perhitungan Penulis menggunakan Metode *Indexs Financial Inclusion* (Sarma & Pais, 2011)

Keterangan : $IFI < 0,3$ *Low Inclusion*

$IFI > 0,3 < 0,6$ *Medium Inclusion*

$IFI > 0,6$ *High Inclusion*

Berdasarkan Gambar 2. diatas mengenai angka indeks inklusi keuangan dan kualitas indeks inklusi keuangan di 33 provinsi di Indonesia , dapat diketahui secara nasional inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya dibawah angka 0,30 persen. Namun jika dilihat dari perkembangannya dari setiap tahun pengamatan data dapat dilihat bahwa indeks inklusi keuangan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan 0,04 % pertahun, meskipun angkanya masih berada dibawah 0,30 %. Hal ini menunjukan masih rendahnya pendalamannya keuangan masyarakat Indonesia, baik itu dari penggunaan layanan perbankan, ketersediaan layanan perbankan maupun kegunaan perbankan itu sendiri bagi masyarakat.

DKI Jakarta merupakan satu satunya provinsi di Indonesia yang berada pada inklusi keuangan yang tinggi dengan nilai indeks mendekati 1. Hal ini menjelaskan bahwa provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia memang faktanya merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia, sebagai sentra industri dan pusat perdagangan di Indonesia. Hal inilah yang mendukung dari segi dimensi penetrasi perbankan dengan nilai DPK tertinggi di Indonesia sebesar Rp 2.721.137 (dalam miliar), sementara dimensi inklusi keuangan yang kedua yaitu dimensi ketersediaan layanan perbankan juga tertinggi sebanyak 4.117 cabang bank yang tersebar di provinsi DKI Jakarta ini. Kemudian dimensi terakhir yaitu dimensi kegunaan layanan perbankan dengan total rasio kredit yang disalurkan perbankan terhadap PDRB sebesar 151 %. Kemudian terdapat 10 provinsi yang berada pada inklusi keuangan dengan kualitas sedang, dan 22 provinsi lainnya masih berada pada IFI (*Index of Financial Inclusion*) rendah.

4.4. Hasil Estimasi Model Panel Simultan

Endogenous Variables	Exogenous Variables	Coefisient	t-satistik
Financial Inclusion	PDRB perkapita (X1)	0.104636*	6.398998
	Inflation (X2)	-0.001135***	-1.702535
	Non Performing Loan (X3)	-0.024873*	-3.360801
	Internet User (X4)	0.002385*	3.909183
	R Square	0.323728	
	Prob F Statistic	0.000000	
Inclusive Growth in Unemployment	Education (X5)	0.003641***	1.694876
	Health (X6)	0.001359***	1.643069
	LogInv (X7)	0.010599**	2.187483
	LogPopulation (x8)	-0.298409	-1.076988

	Pred_Y1	0.545658**	2.573149
	R Square	0.417417	
	Prob F Statistic	0.000000	
Endogenous Variables	Exsogenous Variables	Coefisient	t-salistik
Inclusive Growth in Income Inequality	Education (X5)	-0.000138	-0.221238
	Health (X6)	-0.000166	-1.082968
	LogInv (X7)	-0.000263	-0.219145
	LogPopulation (x8)	-1.021858*	-10.03745
	Pred_Y1	0.163331*	3.195457
	R Square	0.403994	
	Prob F Statistic	0.000000	

Tabel 4. Hasil Analisis Model Panel Simultan Indirect Least Square

***, **, * statistic relationships are significant at 10%, 5%, 1%

Berdasarkan hasil estimasi persamaan simultan dengan metode ILS pada tabel 4 diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut.

Pada persamaan inklusi keuangan semua variabel eksogen secara bersama-sama mempengaruhi inklusi keuangan dimana nilai probabilitas F statistiknya adalah sebesar 0.00 lebih kecil dari alfa 5 persen, kemudian nilai koefisien determinasinya (R square) adalah sebesar 0.3237 yang artinya semua determinan yang digunakan dalam model mampu menjelaskan proporsi varian dari inklusi keuangan di Indonesia sebesar 32,37 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jika dilihat secara parsial maka PDRB Perkapita memiliki hubungan pengaruh yang positif dan signifikan (Ningsih, Aimon, 2021) terhadap inklusi keuangan di Indonesia dengan taraf signifikansi 1 persen. Temuan ini ditegaskan oleh temuan penelitian (Sarma & Pais, 2011; Evans & Adeoye, 2016; Evans & Osi, 2017; Muhoza & Muriu, 2018) Kemudian inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia pada tingkat signifikansi 10%, variabel *Non Performing Loan* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia pada alfa 1 persen. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan penelitian (Mbutor & Uba, 2013; Huong, 2018; Annisa & Arifin, 2019). Sedangkan penggunaan internet memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia pada tingkat signifikansi 1 persen, temuan ini sejalan dengan penelitian (Hanning & Jansen, 2010; Andrianaivo & Kpodar, 2012; Gebrehiwot & Makina, 2019)

Pada persamaan kedua yaitu persamaan pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja terlihat bahwa secara bersama-sama semua variabel eksogen yang

ada dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0. 00 yang lebih kecil dibanding alfa 5 persen. Kemudian nilai koefisien determinasinya adalah sebesar 0.4174 artinya semua determinan yang digunakan dalam model mampu menjelaskan proporsi varian dari pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia sebesar 41,74 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jika dianalisis secara parsial, maka dapat diketahui bahwa Pendidikan dan Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan yang inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia pada taraf signifikansi 10 persen, temuan ini sejalan dengan penelitian (Nunez & Livanos, 2009; Riddell & Song, 2011; Maqbool, 2013; Kaspersen & Pape, 2016). Investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan taraf signifikansi 5 persen terhadap pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia, temuan ini sejalan dengan temuan pada penelitian (Balcerzak & Zurek, 2011; Shaari, 2012; Alrabba, 2017) Jumlah penduduk merupakan satu satunya variabel yang tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif pada estimasi persamaan kedua ini, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Gyang & Gwanka, 2016; Siaw, 2015). Sementara variabel Inklusi keuangan sebagai topik penting kedua penelitian terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia pada taraf signifikansi 5 persen. Hal ini menjelaskan bahwa inklusisi keuangan mampu mendorong pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Dan temuan ini sejalan dengan penelitian (Oji, 2015; Nyarko, 2018; Bakari & dkk, 2019)

Sementara itu pada persamaan ketiga yaitu persamaan pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan, hasil estimasi menunjukkan secara simultan semua variabel eksogen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0.00 lebih kecil dibanding alfa 5 persen. Nilai R square adalah sebesar 0.4012 yang artinya semua determinan yang digunakan dalam model mampu menjelaskan proporsi varian dari pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 40,12 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jika dianalisis secara parsial, maka dapat diketahui bahwa Pendidikan, kesehatan dan Investasi tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pan-Long, 1995; Yang & Qiu, 2016; Oluseye & Gabrie, 2017; Wicaksono & Amir, 2017; Couto, 2018; Zhou & Zhou, 2019; Nessen, 2020) Sementara itu variabel jumlah penduduk ternyata memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada

tingkat signifikansi 1 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Anyanwu J. C., 2013; Fernihough & O'Grada, 2015; Mohamad, 2019; Oluseye & Gabrie, 2017). Terakhir variabel inklusi keuangan berdasarkan hasil estimasi inklusi keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tingkat signifikansi 1%. Hal ini juga menunjukan bahwa ternyata inklusi keuangan mampu mendorong pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Dixit & Ghosh, 2013; Joseph & Varghese, 2014; Manoj, 2015; Banwo, 2020)

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan di 33 provinsi di Indonesia masih berada pada kualitas rendah, hal ini sangat diperlukan peran otoritas moneter dan perbankan dalam terus berupaya mengedukasi masyarakat agar melek perbankan, Salah satu pilar kebijakan BI terkait dengan Strategi Nasional Inklusi Keuangan adalah fasilitas distribusi/intermediasi. *Mobile banking* bisa berfungsi sebagai intermediasi antara penyedia jasa keuangan dengan penduduk Indonesia di berbagai daerah. Sedangkan untuk dimensi kegunaan, pemerintah, Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya bisa mengadakan kredit murah yang mudah diakses oleh para pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal.

Berdasarkan hasil perhitungan pertumbuhan Inklusif di 33 Provinsi di Indonesia menggunakan metode PEGR, secara rata rata pertumbuhan inklusif di Indonesia masih belum tercapai. Artinya masih berada pada kategori inklusifitas “*Not Pro Poor Yet*” dan “*Not Pro Jobs Yet*”. Yang artinya pertumbuhan indonesia sudah mengarah pada perumbuhan inklusif terhadap pengurangan jumlah pengangguran dan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan namun benefit dari pertumbuhan ekonomi masih sedikit dinikmati oleh masyarakat yang mencari kerja dan masyarakat miskin berpendapatan rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk terus berupaya dalam mencapai tujuan pembangunan.

Inklusi keuangan mampu mendorong peluang tercapainya pertumbuhan yang inklusif di Indonesia baik pada pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja maupun pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun dengan inklusi keuangan yang masih rendah pencapaian pertumbuhan inklusif juga tidak akan

maksimal, karena itu diperlukan penguatan pada sektor keuangan melalui inklusi keuangan tersebut.

Pendidikan, Kesehatan dan Investasi seharusnya mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif, namun dalam penelitian ini ketiga variabel hanya berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja, namun tidak menunjukkan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan. Hal ini menjelaskan bahwa investasi di Indonesia belum dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan meskipun sudah mampu menyerap tenaga kerja. Investasi di Indonesia memang masih terpusat di pulau Jawa, lebih dari 50 persen ada di pulau Jawa, sehingga hal ini memicu adanya kesenjangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Kualitas SDM yang tergambar dari Pendidikan dan Kesehatan hanya mampu mendorong pertumbuhan inklusif terhadap kesempatan kerja, SDM yang berkualitas mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga mengurangi angka pengangguran tapi pada kasus ini belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alekhina, V., & Ganelli, G. (2020). Determinants of Inclusive Growth in ASEAN. *International Monetary Fund Working Paper*.
- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications*. Economic and Research Departemen, ADB.
- Alrabba, M. I. (2017). The Determinant of Unemployment Rate in Jordan: A Multivariate Approach. *International Journal of Economics and Finance*; Vol. 9, No. 11.
- Anand, R., & dkk. (2013). Inclusive Growth Revisited: Measurement and Determinants. *Poverty Reduction And Economic Management (Prem) Network, World Bank*.
- Andrianaivo, M., & Kpodar, K. (2012). Mobile Phones, Financial Inclusion, and Growth. *Review of Economics and Institution*. Vol.3 No.2.
- Annisa, S., & Arifin. (2019). faktor-faktor penentu inklusi keuangan di indonesia periode tahun 2012-2016. *Tirtayasa Semarang*.
- Anyanwu, J. C. (2013). Determining the Correlates of Poverty for Inclusive Growth in Africa. *Working Paper Series N° 181 African Development Bank, Tunis, Tunisia*.
- Bakari, & dkk. (2019). An examination of the Impact of Financial Inclusion on Poverty Reduction : An Empirical Evidence from Sub-Saharan Africa. *International of Scientific and Study Publication*, 9(1), 239–252.
- Balcerzak, A. P., & Zurek, M. (2011). Foreign Direct Investment and Unemployment: VAR Analysis for Poland in the Years 1995-2009. *European Research Studies*. Vol. 14.

- Banwo, A. (2020). Financial Inclusion and Entrepreneurship as Drivers of Socially Inclusive Economic Growth: Lessons from China. *Unilag Research and Repository*.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality and the Poor. *J Econ Growth*. 12, 27-49.
- BPS. (2019). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Statistik Indonesia*. Indonesia: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Cahyadi, d. (2018). Inclusive growth and leading sector in Bali. *Economics Journal Of Emerging Markets Available at <http://journal.uji.ac.id/index.php/jep>*, 99-110.
- Chowdhury, M., & Hossain, M. (2014). Determinants of Unemployment in Bangladesh: A Case Study. *Developing Country Studies*, 4(3).
- Couto, V. (2018). Does Foreign Direct Investment Lower Income Inequality? New Evidence And Discussion On The Role Of Service Offshoring (Captive Centers). *Final Paper: Redlas Conference*.
- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion For Inclusive Growth Of India - A Study Of Indian States. *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)*, 147-156.
- Evans, O., & Adeoye, B. (2016). Determinant of financial Inclusion in Africa : a Dinamic Panel Data Approach".
- Evans, O., & Osi, A. R. (2017). Financial Inclusion and GDP Per Capita in Africa: A Bayesian. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol 8 No 18.
- Fernihough, A., & O'Grada, C. (2015). Population and Poverty in Ireland on the Eve of the Great Famine.
- Filardo. (2016). Monetary analysis and the global financial cycle: An Asian central bank perspective. *Jurnal Of Asian Economics*.
- Fisher, I. (1911). *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises Paperback*.
- Gebrehiwot, K., & Makina, D. (2019). Macroeconomic Determinants of Financial Inclusion: Evidence Using Dynamic Panel Data Analysis.
- Ghozali, I. (2011). *Applikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2012). *Basic Econometrics*. Noida: Tata McGraw-Hill Education .
- Gyang, L., & Gwanka, J. (2016). A critical analysis of population growth rate and unemployment growth rate in Nigeria. *Faculty Of Applied And Natural Sciences*.
- Hanning, A., & Jansen, S. (2010). Financial inclusion and financial stability: Current policy issues.
- Huong, N. T. (2018). *The Impact of Financial Inclusion on Monetary Policy: A Case Study in Vietnam*. Vietnam: Journal of Economics and Development, Vol.20, No.2, August 2018, pp. 5-22.
- James, C., & Sassi, F. (2017). Inclusive Growth And Health.
- Joseph, J., & Varghese, T. (2014). *Role of Financial Inclusion in the Development of Indian Economy*. Journal of Economics and Sustainable Development .

- Kakwani, N., & Son, H. H. (2006). Pro-Poor Growth: The Asian Experience. *Research Paper No. 2006/56*.
- Kaspersen, S. L., & Pape, K. (2016). Health and unemployment: 14 years of follow-up on job loss in the Norwegian HUNT Study. *European Journal of Public Health, Volume 26, Issue 2, , 312–317*.
- Kelkar, V. (2010). Financial Inclusion for Inclusive Growth. *ASCI Journal of Management 39(1): 55–68*.
- Klasen. (2010). Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals.
- Koutsoyiannis, A. (1977). *Theory of econometrics*, 2nd ed. New York : MacMillan Publishing .
- Manoj, P. (2015). Financial Inclusion for Inclusive Growth in India: A Macro Level Study of the Commercial Banks. *European Journal of Scientific Research*, 364 -372.
- Maqbool, M. (2013). Determinants of Unemployment Empirical Evidences from Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, 51(2),, 191 -207.
- Maski, G. (2010). *Analisis Kausalitas antara Sektor Keuangan dan Pertumbuhan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 10 No.2, pp 143-158.
- Mbutor, O., & Uba, I. (2013). *the impact of financial inclusion on monetary policy in Nigeria*. Journal Of Economic and International Finance.
- Mohamad, N. (2019). The relationship between poverty, inflation, population and income inequality towards economic growth in Malaysia. *Faculty Of Business Management Sabah*.
- Muhoza, B. K., & Muriu, P. W. (2018). *What drives financial inclusion in Central Africa?* . Kenya: Journal of Economics and Sustainable Development .
- Nessen, T. (2020). Income inequality and Health: Evidence from Swedish municipalities and counties. *Digitala Vetenskapliga Arkivet*.
- Ningsih,S., Aimon, H. (2021). Analysis and Determinants of Financial Inclusion in Indonesia: Panel Approach. *The proceedings series Advances in Economics, Business and Management Research*.
- Nunez, I., & Livanos, I. (2009). Higher education and unemployment in Europe: an analysis of the academic subject and national effects.
- Nyarko, E. (2018). Financial Inclusion, Financial Literacy and Inclusive Growth in Africa.
- Oji, C. h. (2015). *Promoting Financial Inclusion For Inclusive Growth in Africa*. Economic Diplomacy Programme.
- OJK. (September 2020). *Statistik Perbankan Indonesia*. Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan.
- Oluseye, I. C., & Gabrie, A. A. (2017). Determinants of Inclusive Growth in Nigeria: An ARDL Approach. *American Journal of Economics* , 97-109.
- Ozili, P. k. (2020). *Uncertainty and Challenges in Contemporary Economic Behaviour*. Emerald Publishing Limited.
- Pandiella, A. (2016). Making Growth More Inclusive In Costa Rica. *ECONOMICS DEPARTMENT WORKING PAPERS No. 1300*.

- Pan-Long, T. (1995). Foreign direct investment and income inequality: Further evidence. *World Development*, 469-483.
- Park, C. Y., & mercado, R. (2018). Financial Inclusion, Poverty, And Income Inequality. *The Singapore Economic Review*.
- Rauniar, G., & Kanbur, R. (2010). Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature . *Journal of the Asia Pacific Economy* . November .
- Riddell, W. C., & Song, X. (2011). The impact of education on unemployment incidence and re-employment success: Evidence from the U.S. labour market. *Labour Economics*, 453-463.
- Sarma, M., & Pais, J. (2011). Financial Inclusion an Development: A cross Country Analysis.
- Sethy, S. (2018). Developing a financial inclusion index and inclusive growth in India . *The Indian economic journal: the quarterly journal of the Indian Economic Association* . December 2018.
- Shaari, S. M. (2012). The Impact of Foreign Investmen on The Unemployment Rate and Economic Growth in Malaysia, . *Journal of Applied Sciences Reaserch*, vol. 8.
- Siaw, O. L. (2015). The Nexus between Population Growth and Unemployment in Ghana. An Empirical Analysis. *Africa Development And Resources Research Institute (Adrii) (Multidisciplinary)*, 23(23), 26-39.
- SSKI. (2020). *statistik sistem keuangan Indonesia*. SSKI Bank Indonesia.
- Swamy, V. (2008). Bank-based Financial Intermediation for Financial Inclusion and Inclusive Growth.
- Tello, M. (2015). Poverty, Growth, Structural Change and Social Inclusion Programs: A Regional Analysis of Peru. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 15(2), 60-78.
- Tuesta, & dkk. (2015). Financial inclusion and its determinants: the Argentine case. *Working Paper n° 15/03*.
- Turaga, d. (2018). State of Inclusive Growth in India: Some Perspectives. *Vikalpa*, 43(1), 24-46.
- Van Arnum, B. M., & Naples, M. I. (2013). Financialization and income inequality in the United States, 1967-2010. *American Journal of Economics and Sociology*, 72(5), American Journal of Economics and Sociology, 72(5), 1158–1182.
- Vijay, K. (2010). Financial Inclusion for Inclusive Growth. *ASCI Journal of Management* 39(1);, 55-68.
- Wachira, M. I., & Kihiu, E. N. (2012). *Impact of Financial Literacy on Access to Financial Services in Kenya*. Kenya: International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 19; October.
- Wicaksono, E., & Amir, H. (2017). The Sources Of Income Inequality In Indonesia: A Regression-Based Inequality Decomposition. *Abdi Working Paper Series*.
- Yang, J., & Qiu, M. (2016). The impact of education on income inequality andintergenerational mobility. *China Economic Review*, 110-125.

Zhou, J., & Zhou, W. (2019). Contributions of education to inequality of opportunity in income: A counterfactual estimation with data from China. *Research in Social Stratification and Mobility*, 60-70.

